



DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2020

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Tahun 2020. LKjIP Dinas Perdagangan Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/ Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perdagangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perdagangan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, Januari 2021
**Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta**

Ir. HERU SUNARDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum Organisasi	4
B. Fungsi Strategis Dinas Perdagangan.....	6
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perdagangan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	22
C. Capaian Prestasi dan Penghargaan.....	24
BAB IV PENUTUP.....	27
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan.....	27
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	27

Lampiran – Lampiran :

- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Tahun 2020
-

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

- a. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah

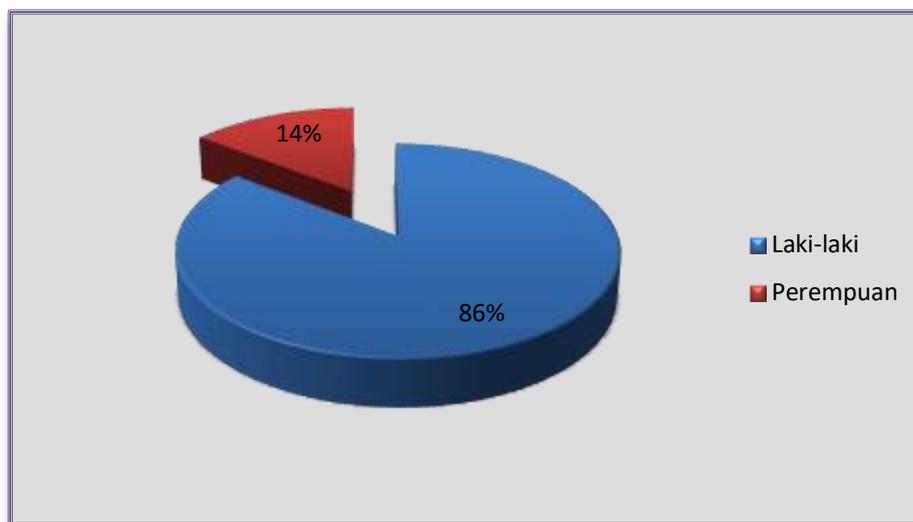
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

- b. Jumlah personil

Berikut data ASN Dinas Perdagangan Kota Surakarta dijelaskan dalam grafik dibawah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

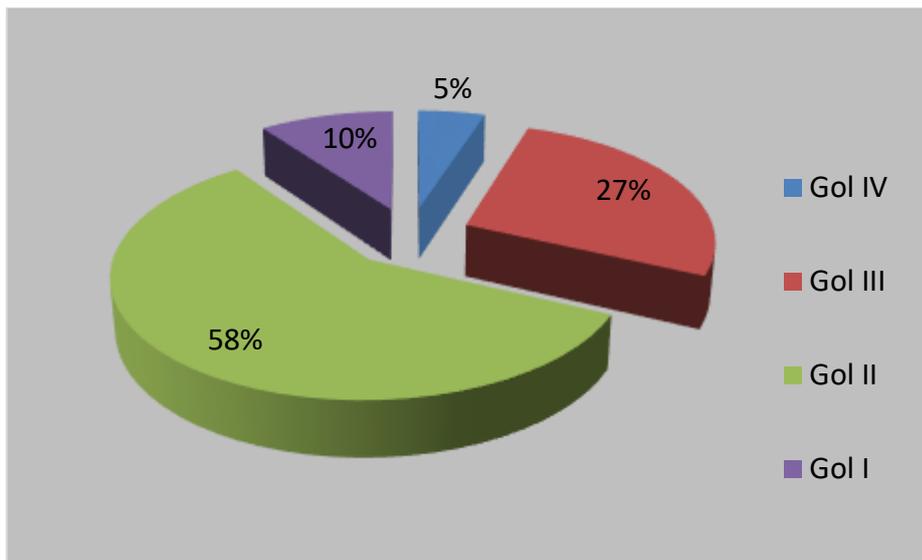
Grafik.1.1. PNS berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Perdagangan Kota Surakarta



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta

2) Berdasarkan Kepangkatan dan golongan

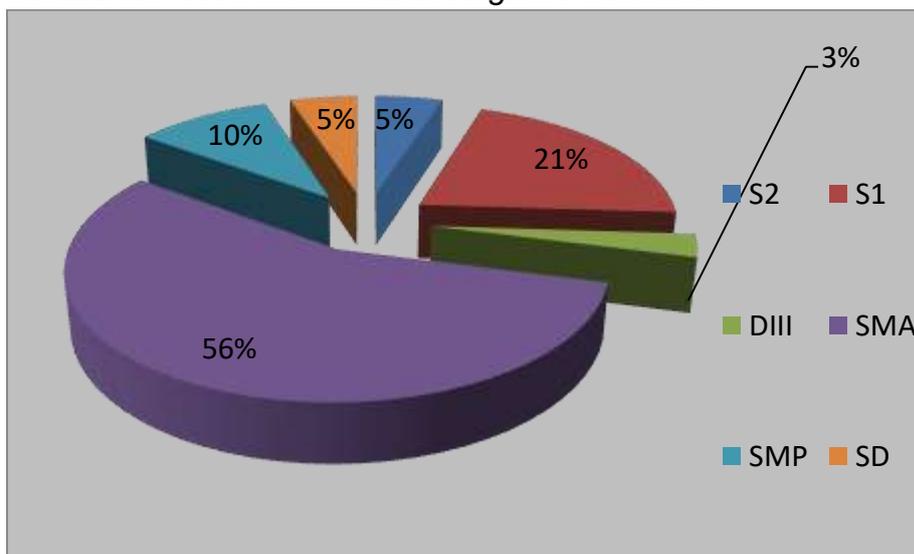
Grafik. 1.2 PNS berdasarkan Kepangkatan dan Golongan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2020

3) Berdasarkan Pendidikan

Grafik. 1.3 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2020

c. Alokasi dan realisasi anggaran

No.	Program	Anggaran	Realisasi (%)
1.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 9.403.987.011	96,29
2.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 187.706.949	96,49
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.443.320.728	95,59
4.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 10.939.602	94,26
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 8.232.783.475	97,26
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 966.540.000	98,78
7.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 31.317.220	93,38
8.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 30.530.000	83,89
9.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 14.428.749	100
10.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 239.519.993,50	95,07
11.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 1.091.872.970	97,59
12.	Program penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 45.177.500	98,72
13.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 181.001.250	98,74
14.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 654.025.500	97,86

1.2. Perencanaan

a. Permasalahan strategis perangkat daerah

Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

➤ **Permasalahan terkait Sekretariat**

- 1) Belum tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan

➤ **Permasalahan terkait Bidang Pasar**

- 1) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

➤ **Permasalahan terkait Bidang Perdagangan**

- 1) Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
- 2) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga sehingga menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok.
- 3) Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
- 4) Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa.

➤ **Permasalahan terkait Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL)**

- 1) Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta

➤ **Permasalahan terkait Bidang Pendapatan**

- 1) Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.

➤ **Permasalahan terkait UPTD Metrologi**

- 1) Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Metrologi disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

b. Visi dan misi perangkat daerah

Visi : “Mengoptimalkan Pelayanan melalui sektor Perdagangan, Pasar Rakyat dan Pengelolaan PKL yang berdaya saing bertumpu pada teknologi dan Budaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.”

Misi Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan peluang usaha dan daya saing disektor perdagangan
2. Mewujudkan pasar rakyat yg representatif, aman, nyaman,& berdaya saing sebagai pusat perbelanjaan untuk semua kalangan.

3. Mewujudkan kapabilitas pelaku usaha sektor perdagangan
 4. Mewujudkan Pengelolaan PKL yg bersih, tertib dan mendukung tata ruang kota
 5. Meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perdagangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
 6. Mewujudkan tertib kemetrolgian
- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan
- 1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**
 - a. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - 2. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**
 - a. Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah
 - 3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan**
 - a. Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan
 - b. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan
 - c. Kegiatan pembangunan pasar perdesaan (DAK)
 - d. Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan (Bantuan Keuangan Propinsi)
 - 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
 - a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**
 - a. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
 - 6. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**
 - a. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
 - b. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

- c. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
- 7. Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
- a. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan PAD
 - b. Kegiatan Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
 - c. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
- 8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
- a. Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
 - b. Kegiatan pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
 - c. Kegiatan pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri
 - d. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - e. Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
- 9. Program Peningkatan komoditas layak ekspor**
- a. Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
 - b. Kegiatan Membangun jejaring dengan eksportir
- 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- a. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - b. Kegiatan Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
- 11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- i. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
- e. Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- f. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- g. Kegiatan Pengadaan mebeleur
- h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- j. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
- e. Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- f. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- g. Kegiatan Pengadaan mebeleur
- h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- j. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

14. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

15. Program perencanaan pembangunan daerah

- a. Kegiatan Penetapan RPJMD
- b. Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- c. Kegiatan Penetapan RKPD
- d. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

16. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

- a. Kegiatan Pengolahan, updating, dan analisis statistik

17. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta dilakukan secara berkala dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun format dalam penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 130.02/117 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surakarta.

Adapun untuk pengukuran kinerja Dinas perdagangan , yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2020.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta .

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perdagangan pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah melaksanakan 15 program 43 kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta Tahun 2020.

Tabel Perjanjian Kinerja (SKPD) awal Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pasar Tradisional dan Toko Modern yang Aman dari bahan berbahaya	82,95%
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar rakyat yang representatif	77,27%
		Persentase lokasi PKL yang tertata	81,35%
3.	Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	US\$ 48.649.000
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai
5.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai Sakip	68 Nilai

Tabel Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2020

No.	Sebelum Perubahan			Sebelum Perubahan		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pasar Tradisional dan Toko Modern yang Aman dari bahan berbahaya	6,25%	Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pasar Tradisional dan Toko Modern yang Aman dari bahan berbahaya	82,95%
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar rakyat yang representatif	77,27%	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar rakyat yang representatif	77,27%
		Persentase lokasi PKL yang tertata	81,35%		Persentase Pertumbuhan PKL	2,5%
3.	Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	US\$48.649.000	Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	US\$48.649.000
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai
5.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai Sakip	68 Nilai	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai Sakip	68 Nilai

No.	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		
	Program	Anggaran	Keterangan	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 60.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 30.530.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
2.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 14.123.286.871,-	Sumber Anggaran dari APBD dan DAK	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 9.403.987.011,-	Sumber Anggaran dari APBD
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.522.429.129,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.443.320.728,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
4.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 200.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 187.706.949,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.159.500.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 239.519.993,50	Sumber Anggaran dari APBD 100%
6.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 2.360.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 1.091.872.620,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 1.774.051.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 654.025.500,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 165.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 14.428.749,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		Analisis	Inovasi	Link Data Dukung	Sumber Data
						Elemen data	Capaian Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pilihan										
4	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :								
				Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja		-	#VALUE!				Dinas Perdagangan
			a. Pusat perbelanjaan	Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	%	-					Dinas Perdagangan
			b. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	%	6		100,00%			Dinas Perdagangan

		Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		6					Dinas Perdagangan
2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	%	-	#VALUE!				Dinas Perdagangan
		Jumlah permohonan penerbitan TDG		-					Dinas Perdagangan
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	%	-	#VALUE!				Dinas Perdagangan
		Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota		-					Dinas Perdagangan
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk								
	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas	%	-	#VALUE!				Dinas Perdagangan

		permohonan diterima secara lengkap dan atau benar							
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		-					Dinas Perdagangan
	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	-	#VALUE!				Dinas Perdagangan
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan		-					Dinas Perdagangan

		dari waralaba dalam negeri							
	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	-	#VALUE!				Dinas Perdagangan
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		-					Dinas Perdagangan
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan aberbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan	%		#DIV/0!				Dinas Perdagangan

	berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	berbahaya di tingkat Daerah Kab/Kota							
		Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer							Dinas Perdagangan
6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam)	%		#DIV/0!				Dinas Perdagangan
		Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar							Dinas Perdagangan
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$	%	0	0,00%				Dinas Perdagangan
		K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya							

		a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)							
		b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)							
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%		0				Dinas Perdagangan
Persentase penanganan pengaduan konsumen									
1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Pengaduan		0				Dinas Perdagangan
2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi		Konsumen		0				Dinas Perdagangan

Persentase kinerja realisasi pupuk										
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan (X)	a	%	56450	99,91%				Dinas Perdagangan	
		b x c		56500					Dinas Perdagangan	
		X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan								
		a = Jumlah pupuk yang disalurkan								
		b = Target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat Kab/Kota sebesar 90% dari RDKK								
		c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)								
Persentase kinerja realisasi pupuk										
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	%	479.766	99,29%				Dinas Perdagangan	

		(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota		483.197					Dinas Perdagangan
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%		#DIV/0!				Dinas Perdagangan
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan						Dinas Perdagangan	

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2.2.1. Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pasar tradisional dan Toko modern yang Aman dari bahan berbahaya	6,25%
2.	Tersedianya sarana distribusi yang berdaya saing	Persentase pasar rakyat yang representatif	77,27%
		Persentase pertumbuhan PKL	91,07%
3.	Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	US \$ 48.649.000
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai
5.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai Sakip	68 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 60.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Rp 14.123.286.871	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 4.522.429.129	Sumber Anggaran dari APBD 100%
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 200.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%

5.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rp 2.360.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 1.159.500.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp 165.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Rp 1.774.051.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%

2.2.2. Akuntabilitas Kinerja

2.2.2.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2020, Dinas Perdagangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN 1 :**Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan**

Pada sasaran 1 yang merupakan urusan bidang perdagangan dalam hal perlindungan terhadap Konsumen maka indikator yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ditemukan bahan berbahaya terhadap jumlah pasar tradisional dan modern di Kota Surakarta.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmnya 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan barang beredar di pasar tradisional dan toko modern	Tingkat Terlindunginya konsumen	82,95%	81%	97,65	98,85	90,86
Rata-rata capaian sasaran 1				97,65		

Dari Tabel diatas Untuk mencapai sasaran tersebut didukung Program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut terdiri atas :

1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut merupakan tupoksi yang secara khusus dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Kota Surakarta pada Tahun 2020.

Capaian kinerja pada sasaran ini belum memenuhi target yang direncanakan. Hal itu disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang menjangkiti di negara Indonesia dan khususnya Kota Surakarta mulai bulan Februari tahun 2020 hingga menyebabkan kegiatan antara lain pengawasan peredaran barang dan jasa, monitoring kebutuhan pokok masyarakat serta pengawasan ke pasar – pasar tradisional dan Pasar Modern tidak terlaksana secara optimal.

SASARAN 2 :

Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing

Sasaran 2 merupakan penggabungan beberapa pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pasar Tradisional yang berjumlah 44 pasar dan Pengelolaan PKL . Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 2 ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya (2019)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya sarana prasarana ekonomi	Persentase Pasar Rakyat yang Representatif	75	75%	100	100	94,29

yang berdaya saing	Persentase realisasi pencapaian target retribusi pasar, pkl dan metrologi	90	112,21%	124,68	73,71	124,68
	Persentase lokasi PKL yang tertata	91,07%	93%	102,12	104	100,15
Rata-rata capaian sasaran 2				107,95		

Untuk Pengukuran Indikator pertama pada **sasaran-2 yaitu Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan** adalah sebagai wujud Misi Walikota Surakarta dari misi Wareg untuk “Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”.

Meski dalam kondisi pandemi Covid -19 Indikator kinerja Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan bisa tercapai target 100%. Hal itu tidak lepas dari pembangunan yang tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Adapun keberhasilan didukung beberapa kegiatan meliputi :

1. Pembangunan Pasar Perdesaan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan
3. Pembangunan Pasar Perdesaan (Bantuan Keuangan Propinsi/Pusat)
4. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5. Pengendalian Keamanan Lingkungan
6. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Untuk Pengukuran Indikator ke 2 yaitu Persentase realisasi pencapaian target retribusi pasar, pkl dan metrologi pada pencapaian sasaran-2 melebihi capaian dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 124,68%. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut tidak lepas dari Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan-kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan optimal.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja **sasaran-2 untuk indikator ketiga yaitu Persentase lokasi PKL yang tertata** telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 91,07%. Adapun realisasi mencapai 93% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas perbaikan shelter yang sangat mendesak untuk diperbaiki.
2. Memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk ikut menjaga tempat usaha mereka
3. Melakukan sosialisai dan koordinasi dengan pedagang untuk penataan lokasi PKL.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah lokasi PKL yang sudah tertata melalui pembuatan shelter, gerobak dan payung/tenda.
2. Melakukan pertemuan secara rutin dan bergilir kepada para perwakilan pedagang pasar sehingga tercipta komunikasi yang baik.
3. Kerja sama dengan Pihak Swasta melalui Program CSR.

2.2.2.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran Langsung sebesar Rp. 48.583.863.112,- , Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 45.754.615.862,- dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 2.829.247.250,-. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Belanja Pegawai, sebesar | Rp. | 1.025.785.300,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar | Rp. | 33.163.796.962,- |
| 3. Belanja Modal, sebesar | Rp. | 14.394.280.850,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	KINERJA				ANGGARAN		
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Perlindungan konsumen dan pengamanan barang beredar di pasar tradisional dan toko modern	Tingkat Terlindunginya konsumen	82,95 %	81 %	97,65	30.530.000	25.612.125	83,89
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat yang representatif	75%	75%	100	9.403.987.011	9.054.795.772	96,29
		Persentase realisasi pencapaian target retribusi pasar, pkl dan metrologi	90%	112,21%	124,68	654.025.500	640.038.100	97,86
		Persentase lokasi PKL yang tertata	91,07%	93%	102,12	1.091.872.970	1.065.564.670	97,59

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta dilakukan secara berkala dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun pada peraturan tersebut tidak menyajikan format dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga pedoman yang diacu adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Adapun untuk pengukuran kinerja Dinas perdagangan , yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2020.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Formulir Tabel VII-C dapat mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut yang diinterpretasi atas digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu dalam tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, Dinas Perdagangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN 1 :

"Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan"

Pada sasaran 1 yang merupakan urusan bidang perdagangan dalam hal perlindungan terhadap Konsumen maka indikator yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ditemukan

bahan berbahaya terhadap jumlah pasar tradisional dan modern di Kota Surakarta.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmnya 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional dan Toko Modern yang aman dari bahan berbahaya	82,95 %	81 %	97,65	98,84	90,86
Rata-rata capaian sasaran 1				97,65		

Dari Tabel diatas Untuk mencapai sasaran tersebut didukung Program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut terdiri atas :

1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

- Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut merupakan tupoksi yang secara khusus dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Kota Surakarta pada Tahun 2020.

Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain :

- Monitoring pengawasan barang beredar berlabel SNI, BPPOM, P-IRT, Kadaluarsa dan Berbahaya/Alkohol.
- Monitoring/Pengawasan Distribusi Peredaran Barang dan Stock Braang;
- Monitoring Pendistribusian dan Harga LPG 3 Kg

SASARAN 2 :

"Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing"

Sasaran 2 merupakan penggabungan beberapa pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pasar Tradisional yang berjumlah 44 pasar dan Pengelolaan PKL . Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 2 ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya (2018)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat yang Representatif	77,27	75	97,06	75	94,46
	Persentase pertumbuhan PKL	2,5	3,19%	127,6	98,8	127,6
Rata-rata capaian sasaran 2				112,33		

Untuk Pengukuran Indikator pertama pada **sasaran-2 yaitu Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan** adalah sebagai wujud Misi Walikota Surakarta dari misi Wareg untuk “Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”.

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakannya revitalisasi Pasar rakyat sehingga pasar yang memenuhi persyaratan tetap 33 Pasar Tradisional. Hal ini dikarenakan rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang semula telah dianggarkan dalam dana DAK. Dalam masa pandemic COVID-19 ini Pasar Tradisional/Rakyat harus tetap melaksanakan aktivitasnya, sehingga upaya - upaya yang dilakukan mengacu pada kebijakan penanganan untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Pasar Rakyat.

Selanjutnya upaya agar pasar rakyat tetap representatif harus didukung beberapa kegiatan meliputi :

Kegiatan	Aktivitas
1. Pembangunan Pasar Perdesaan	DED Pasar Purwosari
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan	- Pemeliharaan Pasar - Pasar
3. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	- Pembelian Peralatan Kebersihan Pasar – pasar - Penyediaan sabun cuci tangan/Handsanitizer
4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Pelatihan Pencegahan Kebakaran - Penertiban Disiplin Pedagang baik batas gelaran dagangan maupun pelaksanaan Prokes COVID-19

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator pertama ini dalam rentang waktu , diantaranya adalah :

1. Prilaku pedagang yang belum mendukung terciptanya kondisi pasar yang bersih, tertib dan aman serta melaksanakan Prokes COVID-19.

2. Dana DAK untuk pembangunan Pasar Purwosari telah dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga Pedagang Pasar Purwosari untuk tahun 2020 - 2021 akan tetap menempati pasar darurat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pertama, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya kontinuitas pelaksanaan sosialisasi kebersihan dan khususnya prokes *COVID-19*, ketertiban dan keamanan terhadap pedagang dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang.
2. Memaksimalkan agar CSR berperan aktif dalam mendukung sarana dan prasarana untuk pasar rakyat.

Adapun ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Menganggarkan kembali revitalisasi Pasar Purwosari.
2. Melanjutkan Pemeliharaan Pasar yang telah diprioritaskan
3. Membuat strategi dalam menghadapi kebiasaan baru baik dalam hal pengelolaan pasar maupun manajemen pasar.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja **sasaran-2 untuk indikator kedua yaitu Persentase pertumbuhan PKL** telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 89.28%. Adapun realisasi mencapai 92,86% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas perbaikan shelter yang sangat mendesak untuk diperbaiki.
2. Memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk ikut menjaga tempat usaha mereka dan mengikuti Prokes CoVID pada masa kebiasaan baru dalam menggelar dagangan.
3. Melakukan sosialisai dan koordinasi dengan pedagang untuk penataan lokasi PKL.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah lokasi PKL yang sudah tertata melalui pembuatan shelter, gerobak dan payung/tenda.
2. Penyediaan sarana Prokes COVID-19 dalam mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat. Khususnya pada Shelter – shelter disediakan Sarana Cuci Tangan
3. Kerja sama dengan Pihak Swasta melalui Program CSR.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian pada indikator ketiga ini , diantaranya adalah :

1. Fluktuasi jumlah pedagang kaki lima untuk setiap bulan/tahun.
2. Kurangnya kesadaran PKL dalam menjaga Kebersihan tempat dagangan .
3. Kurangnya tempat untuk penataan Shelter

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **indikator kedua** untuk **sasaran-2**, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai diatas target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian tersebut akan lebih meningkat lagi apabila kendala bisa dihadapi secara maksimal.

Adapun Tantangan, hambatan dan kendala yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian indikator kedua pada **sasaran -2** , diantaranya adalah :

1. Maraknya perdagangan Online menjadi tantangan Pasar tradisional untuk dapat tetap bersaing. Sehingga diperlukan promosi pasar rakyat dan mencari strategi pemasaran yang mengikuti kebiasaan konsumen.
2. Mutu Jenis dagangan yang diajakan belum maksimal sehingga kurang menarik minat pembeli.

SASARAN 3 :

" Meningkatkan kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta "

Sasaran 3 merupakan pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Urusan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri . Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 3 ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target US\$	Realisasi US \$	%	% Capaian Tahun Sebelumnya (2019)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ekspor Produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	48.649.000	33.036.500,50	67,91	93,62	68,40
Rata – rata capaian Sasaran 3				67,91		

Pada sasaran 3 dengan indikator Nilai Ekspor pada tahun 2020 hanya 67,91% dari target yang ditetapkan dan dibandingkan tahun 2019 dengan persentase 93,62% sangat jauh dari target dan capaian tahun sebelumnya. Adapun berdasarkan target nilai akhir Renstra sebesar 244.960.126,67 US \$ maka baru mencapai 68,40 %. Hal ini disebabkan antara lain :

- Dari produk yang dihasilkan masih banyak yang belum memenuhi standar ekspor negara yang dituju.
- Belum maksimalnya pendampingan kepada UMK yang sudah siap ekspor baik dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar produk untuk ekspor.

- Pelayanan pengajuan Surat Keterangan Asal/COO sebagai syarat ekspor tidak dibatasi wilayah sehingga data yang ada hanya berdasarkan pada pengajuan SKA di Kota Surakarta saja.
- Adanya Pandemi *COVID-19* Tahun 2020 ini sangat berpengaruh atas permintaan ekspor dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan permohonan SKA .
2. Memberikan penjelasan tentang Ekspor kepada UMK Kota Surakarta yang membutuhkan informasi ekspor.
3. Memberikan sosialisasi kepada UMK Kota Surakarta tentang peluang dan tantangan Ekspor serta kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan/Mengoptimalkan pelayanan SKA/COO.
2. Mengidentifikasi dengan bekerjasama dengan OPD terkait UMK yang memiliki potensi Ekspor untuk dapat di dorong kearah ekspor.
3. Membuka peluang kepada UMK yang akan melakukan ekspor dengan memberi sosialisasi atas kebijakan Luar Negeri.

Adapun dalam mendukung kebijakan dalam pencapaian target ditetapkan kegiatan pendukung yang terdiri atas :

1. Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2. Kegiatan Membangun jejaring dengan eksportir

SASARAN 4 :

" Meningkatkan kualitas pelayanan "

Sasaran 4 merupakan pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Kepada Masyarakat . Sasaran ke 4 ini juga ditetapkan menjadi sasaran strategis Dinas Perdagangan dikarenakan sebagai OPD Teknis yang

melaksanakan pelayanan yaitu Penerbitan SKA untuk Ekspor, SHP pada Pedagang Pasar dan SIP pada PKL .Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 4 ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya (2019)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai	85,15 Nilai	118,26	118,57	113,53
Rata – rata capaian Sasaran 4				118,26		

Adapun menentukan Nilai SKM ini seyogyanya dilaksanakan Pihak Ketiga yang lebih Independen. Akan tetapi untuk Tahun 2020 Survey Kepuasan dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim dari Dinas Perdagangan . Akan tetapi walaupun dilakukan secara mandiri survey dilakukan secara objektif dengan jumlah responden 150 responden dan jumlah ini merupakan diatas jumlah minimal yang ditentukan dari Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta yang mengacu pada Permenpan RB dari Pedagang Pasar , Pelaku Ekspor dan PKL

Dalam rangka meningkatkan mencapai kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan .
2. Melaksanakan Survey Kepuasan terhadap masyarakat secara continue.
3. Mengevaluasi serta mengidentifikasi hasil Survey Kepuasan tersebut .

Selanjutnya ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan review SOP baik pelayanan ataupun tupoksi.
2. Meningkatkan Pelayanan pada Pasar Tradisional dan Shelter PKL baik secara administrasi maupun pemenuhan sarana prasarana pasar.

3. Mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan kepada Pelaku Ekspor, Pedagang Pasar dan PKL.

SASARAN 5 :

"Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja "

Sasaran 5 merupakan pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Kinerja Dinas Perdagangan . Adapun sasaran strategis ke 5 ini adalah proses pencapaian kinerja berawal dari perencanaan , implementasinya dan Evaluasi Kinerja Dinas Perdagangan itu sendiri. Selanjutnya penilaian atas pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surakarta yang menilai selama 1 Tahun anggaran. Periode penilaian dimulai dari perencanaan awal sampai dibuatnya laporan kinerja OPD. Adapun hal tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelum nya (2019)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	68 Nilai	68 Nilai	100	100	94,29
Rata – rata capaian Sasaran 5				100		

Dari table diatas data realisasi tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 karena belum ada penilaian SAKIP yang dilakukan Inspektorat. Akan tetapi secara administrasi Kinerja Dinas Perdagangan memenuhi semua unsur SAKIP mulai dari

Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, RTP Sampai Dokumen SKM. Hal ini tersebut juga dapat dilihat dari capaian kinerja dan realisasi dalam pencapaian target urusan Dinas Perdagangan dalam SIPD Tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan mencapai kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Melaksanakan Perencanaan dengan mengacu pada Tahapan – tahapan perencanaan .

1. Menyusun Dokumen Perencanaan yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan Evaluasi secara periodik
3. Melaksanakan Koordinasi antar Bidang

Selanjutnya ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan/Mengoptimalkan Data capaian kinerja tahun lalu untuk perencanaan tahun yang akan datang
2. Melaksanakan Koordinasi secara priodik antar bidang
3. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan secara priodik

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **25.533.150.947,50** , Angaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. **25.533.150.947,50**. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Belanja Pegawai, sebesar | Rp. | 846.706.000,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar | Rp. | 23.986.476.173,50 |
| 3. Belanja Modal, sebesar | Rp. | 699.968.774,00 |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	KINERJA				ANGGARAN		
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional dan Toko Modern yang aman dari bahan berbahaya	82,95 %	81,00 %	97,65	16.275.000	16.273.900	99,99
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat yang representatif	77,27	75%	97,06	14.035.014.688	13.487.746.756	96,10
		Persentase Pertumbuhan PKL	2,5%	3,19%	127,6	1.091.872.970	1.064.644.770	97,51
3.	Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	46.333.000 US \$	33.036.500,50 US \$	93,62	14.428.749	14.428.550	99,99
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai SKM	72 Nilai	85,15 Nilai	118,26	9.230.640.695	8.991.189.830	97,41
5.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	68 Nilai	68 Nilai	100	237.118.352	233.638.700	98,53

BAB IV **P E N U T U P**

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan khususnya Perdagangan rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Perdagangan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada Tahun 2020 yang merupakan kondisi pandemi global *COVID-19*. Hal tersebut sangat berdampak atas kebijakan dan strategi yang diambil dan target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Dinas Perdagangan tetap mensinkronkan perubahan kebijakan terhadap target yang telah ditetapkan sehingga fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (99,23%), dengan rincian rata – rata capaian per sasaran 1 = 97,65%, Sasaran 2 = 112,33% , Sasaran 3 = 67,91%, Sasaran 4 = 118,26%, Sasaran 5 = 100%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan di masa mendatang antara lain :

- a. Meningkatkan pengawasan/monitoring peredaran barang dan jasa
- b. Meningkatkan kondisi pasar tradisional yang representatif melalui Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penambahan sarana dan prasarana serta pemenuhan prokes *COVID-19*.
- c. Merenovasi Pasar – pasar
- d. Menata PKL kedalam Pasar/Shelter/Gerobak dagangan, memberikan fasilitas pelatihan usaha.
- e. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan UMKM siap Ekspor secara administrasi dan manajemen produk.
- f. Melaksanakan SKM pada Pasar Rakyat, PKL dan Pelayanan SKA secara berkala
- g. Melaksanakan Evaluasi atas Kinerja Dinas Perdagangan untuk menyusun langkah – langkah perencanaan tahun berikutnya.
- h. Melakukan pendataan /verifikasi data obyek dan subyek retribusi pasar & PKL
- i. Optimalisasi pemungutan retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan
- j. Kerjasama dengan CSR.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Dinas Perdagangan Kota Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Surakarta, Februari 2021
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ir. HERU SUNARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199303 1 004